

# PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Email: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

Website: <http://pt-bandung.go.id>

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKjIP] TAHUN 2019



**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
Jalan Cimuncang No.21 D Bandung  
Telp. 022-87832124 Fax. 022-87832125  
e-mail: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)



# Kata Pengantar

*Bismillaahirrahmaannirrohiim,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun laporan kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Bandung dalam kurun waktu Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dalam **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2019.**



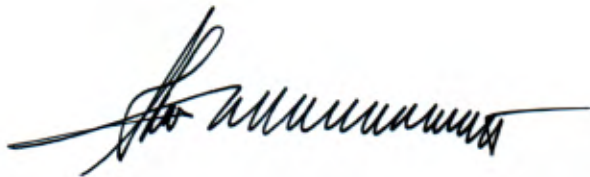
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, selain menguraikan capaian kinerja Tahun 2019 juga menguraikan tentang Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2015 – 2019, dalam Laporan ini kami sampaikan hasil capaian yang telah diraih Pengadilan Tinggi Bandung selama tahun 2019 serta kami laporkan pula kekurangan, hambatan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan kerja, namun demikian kekurangan dan hambatan tidak mengurangi atau menghambat target dan capaian kinerja yang direncanakan untuk tahun 2019, rekomendasi diperlukan dalam rangka mencapai hasil kerja maksimal di tahun mendatang dengan demikian melalui **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)** ini diharapkan pelaksanaan tugas dan kerja Pengadilan Tinggi Bandung yang sudah terlampaui menjadi acuan untuk kinerja di tahun mendatang guna memaksimalkan capaian kinerja yang mendukung Visi Misi Mahkamah Agung dan di implementasikan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, Pengadilan Tinggi Bandung diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

*Terima kasih.*

**Bandung, 21 Februari 2019**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Abdul Kadir', with a long horizontal flourish extending to the right.

**H. ABDUL KADIR,SH.,MH.**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung selama Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding dan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”. Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam pencapaian Visi tersebut Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai tujuan:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) sasaran kinerja utama yang dijabarkan dalam suatu analisis akuntabilitas kinerja.

Perbandingan Akuntabilitas pengukuran kinerja tahun 2018 dan 2019 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dari perbandingan data presentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 5.26% dibandingkan pada tahun 2018.
2. Dari perbandingan data presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 1.12% dibandingkan pada tahun 2018.
3. Dari perbandingan data presentase penurunan sisa perkara tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 4.38% dibandingkan pada tahun 2018.
4. Dari perbandingan data presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ,PK tahun 2018 dan 2019, untuk upaya hukum kasasi pada tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 0.12% dibandingkan pada tahun 2019 dan untuk upaya

hukum PK pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,69% dibandingkan pada tahun 2019.

5. Dari perbandingan data presentase Index Kepuasan Pencari Keadilan tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 6,41% dibandingkan pada tahun 2019.
6. Dari perbandingan data presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2018 sama dengan pada tahun 2019 yaitu 100%.
7. Dari perbandingan data Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018
8. Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan Pengadilan Tinggi Bandung yaitu
  - a. Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2019 dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar **99.41%**
  - b. Realisasi DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum adalah sebesar dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar **98.48%**.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
A.    Latar Belakang .....	8
B.    Tugas Pokok dan Fungsi Instansi .....	11
C.    Dasar Hukum Penyusunan LKjIP .....	12
D.    Sistematika Penyajian Laporan .....	13
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A.    Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.....	15
B.    Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 .....	19
C.    Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	22
D.    Penetapan Kinerja Tahun 2019 .....	22
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A.    Akuntabilitas Kinerja .....	24
1.   Pengukuran Kinerja Kegiatan .....	24
2.   Pengukuran Pencapaian Sasaran .....	26
B.    Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	28
1.   Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .....	28
2.   Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	38
C.    Akuntabilitas Keuangan .....	41
<b>BAB IV   PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A.    Keberhasilan .....	45
B.    Hambatan / Masalah .....	45
C.    Rekomendasi.....	46

## LAMPIRAN

# Daftar Tabel

No.	Nama Tabel	Hal.
1.	Jumlah Pegawai.....	8
2.	Wilayah Hukum.....	9
3.	Reviu Renstra Tahun 2015-2019.....	18
4.	Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019.....	19
5.	Rencana Kinerja Tahun 2019.....	22
6.	Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	23
7.	Pengukuran Kinerja Kegiatan.....	25
8.	Pengukuran Kinerja Sasaran.....	26
9.	Pengukuran Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan, akuntabel.....	28
10.	Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2019.....	29
11.	Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2019.....	30
12.	Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019.....	31
13.	Prosentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019.....	31
14.	Prosentase Penurunan Sisa perkara Tahun 2019.....	32
15.	Prosentase Penurunan sisa prkara tahun 2019.....	33
16.	Prosentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, PK Tahun 2019....	34
17.	Prosentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Uapaya Hukum Kasasi, PK Tahun 2019..	35
18.	Pengukuran Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	38
19.	Prosentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019.....	39
20.	Prosentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019.....	40
21.	Prosentase Putusan Perkara Tipikor Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Tahun 2019.....	41
22.	Alokasi DIPA Tahun 2019.....	42
23.	DIPA BUA Tahun 2019 .....	42
24.	Realisasi Anggaran Dipa Tahun 2019 .....	43

# Daftar Grafik

No.	Nama Grafik	Hal.
1.	Pagu DIPA BUA Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019.....	43
2.	Pagu DIPA BADILUM Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019.....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Bandung membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung dibentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Provinsi Bandung termasuk wilayah Banten, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten.

Kantor Pengadilan Tinggi Bandung terletak di Jalan Cimuncang No. 21 D Bandung dengan luas tanah 4.000 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 3.026,60 M<sup>2</sup> namun belum diresmikan.

Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2019, jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Bandung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Pegawai**

<b>No</b>	<b>Tenaga Teknis</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ketua	1	Aktif
2	Wakil Ketua	1	Aktif
3	Hakim Tinggi	41	Aktif

4	Hakim Ad Hoc Tipikor	8	Aktif
5	Hakim Yustisial	4	Tidak Aktif
6	Panitera	1	Aktif
7	Sekretaris	1	Aktif
8	Panitera Muda	4	Aktif
9	Kepala Bagian	2	Aktif
10	Kepala Sub Bagian	4	Aktif
11	Panitera Pengganti	30	Aktif
12	Staf Pelaksana	22	Aktif
13	Pranata Komputer	2	Aktif
14	Pustakawan	1	Aktif
<b>Jumlah</b>		<b>122</b>	

Untuk tenaga kontrak atau pekerja tidak tetap di Pengadilan Tinggi Bandung adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang, terdiri dari 4 (empat) orang tenaga *security/satpam*, 4 (empat) orang tenaga supir dan 12 (dua belas) orang tenaga pramubakti.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung meliputi 18 (delapan belas) Pemerintah Kabupaten dan 9 (sembilan) Pemerintah Kota di seluruh Provinsi Bandung dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang wilayah hukumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Wilayah Hukum**

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KLAS PENGADILAN
1	Pengadilan Negeri Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	IA Khusus
3	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung.	IA
			Kota Cimahi.	
			Kabupaten Bandung Barat.	
4	Pengadilan Negeri Cibinong	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor.	IA
5	Pengadilan Negeri Depok	Kota Depok	Kota Depok.	IB

6	Pengadilan Negeri Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	IB
7	Pengadilan Negeri Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	IB
8	Pengadilan Negeri Sumber	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	IB
9	Pengadilan Negeri Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	IB
10	Pengadilan Negeri Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	IB
11	Pengadilan Negeri Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	IB
12	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya	IA
13	Pengadilan Negeri Bogor	Kota Bogor	Kota Bogor	IB
14	Pengadilan Negeri Sukabumi	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	IB
15	Pengadilan Negeri Cibadak	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	IB
16	Pengadilan Negeri Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	IB
17	Pengadilan Negeri Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis Kabupaten Pangandaran	IB
18	Pengadilan Negeri Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	IB
19	Pengadilan Negeri Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	II
20	Pengadilan Negeri Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	II
21	Pengadilan Negeri Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	IB
22	Pengadilan Negeri Banjar	Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	II

23	Pengadilan Negeri Cikarang	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	II
----	-------------------------------	------------------	------------------	----

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu dimana setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut terlihat dari luas wilayah kerja yang ditangani terutama pada Pengadilan Negeri Bekasi yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten, Pengadilan Negeri Bale Bandung yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten, Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten dan Pengadilan Negeri Ciamis yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten. Disamping hal tersebut Pengadilan Tinggi Bandung telah mengusulkan kenaikan kelas untuk setiap Pengadilan tingkat pertama di wilayah Jawa Barat.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Pengadilan Tinggi Bandung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Pengadilan Tinggi lainnya mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding yang masuk.

Adapun fungsi Pengadilan Tinggi Bandung antara lain :

1. **Fungsi mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat banding.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan



dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya :**
  - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
  - b. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

### **C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

#### **D. Sistematika Penyajian Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

- |          |   |
|----------|---|
| BAB I    | Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Bandung dan tentang LKjIP, yang dituangkan dalam a. Latar Belakang, b. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi, c. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP, dan d. Sistematika Penyajian Laporan.   |
| BAB II   | Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun anggaran 2019 yang berisikan antara lain a. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung, b. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019, dan c. Penetapan Kinerja Tahun 2019, dan d. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019. |
| BAB III  | Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung yang dipaparkan dalam a. Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran), b. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan c. Akuntabilitas Keuangan.   |
| BAB IV   | Penutup, menguraikan a. Keberhasilan, b. Hambatan/Masalah, c. Pemecahan Masalah   |
| LAMPIRAN | <p>Terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung</li><li>2. S.K. Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019</li></ol>   |



3. S.K. Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. S.K. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Bandung
5. S.K. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung, Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019
6. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung
7. Matriks Renstra 2015-2019
8. Rencana Kinerja Tahun 2020, 2021
9. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
10. SK. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020
11. Data Penghargaan
12. Pernyataan Telah Direviu
13. Checklist Reviu.

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019**

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bandung diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung R.I yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Peradilan Tingkat Banding dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana visi Mahkamah Agung RI yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung Yang Agung”**.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tinggi Bandung juga membawa misi, yaitu:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
  - a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan.
  - b. Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  - c. Presentase Presentase Penurunan Sisa Perkara
  - d. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasai, PK
  - e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  - a. Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
  - b. Presentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Bandung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan.

**Adapun Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :**

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Meng-upload perkara ke SIPP/*website*.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan melaksanakan pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Bandung telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor



W11./1223/OT.01.2/XI/2019 tanggal 10 Desember 2019 Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Bandung, dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel 3. Tabel Reviu Renstra 2015-2019  
(terlampir)**

SASARAN			TARGET
NO.	URAIAN	INDIKATOR	2019
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4.5%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	55% 100%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Tinggi Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U/1222/OT.01.2/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>JUMLAH SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN</b></p> <p>----- X 100%</p> <p><b>JUMLAH SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN</b></p> </div> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN</b></p> <p>-----X 100%</p> <p><b>JUMLAH PERKARA YANG ADA</b></p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)</li> </ul> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan</p> <p>Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</p>		



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>		
		c. Persentase penurunan sisa perkara	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <math display="block">\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math> </div> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan</p> <p>Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasasi</li> <li>PK</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">x 100%</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH PUTUSAN PERKARA</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responded Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>INDEX KEPUASAN PENCARI Keadilan</b></p> </div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<div><p>JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU</p><p>----- X 100%</p><p>JUMLAH PUTUSAN</p></div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<div><p>JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YANG DI UPLOAD DALAM WEBSITE</p><p>----- X 100</p><p>JUMLAH PERKARA MENARIK</p><p>PERHATIAN MASYARAKAT YANG DIPUTUS</p></div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus</li><li>Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### C. Rencana Kinerja Tahun 2019

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2019**

SASARAN			TARGET
NO.	URAIAN	INDIKATOR	2019
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4.5%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	5.5% 100%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%

### D. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Bandung, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Penetapan Kinerja Tahun 2019**

SASARAN			TARGET
NO.	URAIAN	INDIKATOR	2019
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4.5%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - PK - KASASI	55% 100%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%

#### **A. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

##### **1. Pengukuran Kinerja Kegiatan**

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (sesuai rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).



Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2019 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

REALISASI
CAPAIAN = ----- X 100%
TARGET

**Tabel 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan**

SASARAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO.	URAIAN	INDIKATOR	2019		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	94,12%	94,12%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	87,44%	95,04%
		Presentase Penurunan Sisa Perkara	4,5%	4,38%	97,33%
		Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Kasasi	55%	52,74%	95,89%
		- PK	100%	97,89%	97,89%



		Indeks Responden Pengadilan Tingkat e. Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%	97,79%	99,79%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Presentase Salinan a. Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,00%
		Presentase Putusan b. Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	100%

## 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut:

**Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran**

SASARAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO.	URAIAN	INDIKATOR	2019		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN	Persentase sisa a. perkara yang diselesaikan	100%	94,12%	94,12%

	YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Persentase perkara b. yang diselesaikan tepat waktu	92%	87,44%	95,04%
		Presentase Penurunan c. Sisa Perkara	4,5%	4,38%	97,33%
		Presentase Perkara d. yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Kasasi	55%	52,74%	95,89%
		- PK	100%	97,89%	97,89%
		Indeks Responden Pengadilan Tingkat e. Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%	97,79%	99,79%
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Presentase Salinan a. Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,00%
		Presentase Putusan b. Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	100%

Pengukuran Pencapaian Sasaran memiliki nilai yang sama dengan pengukuran Kinerja Kegiatan dikarenakan Penetapan Kinerja Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2019 dengan target yang sama.

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table di atas, untuk mencapai sasara yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Tansparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Pengukuran Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

SASARAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO.	URAIAN	INDIKATOR	2019		
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	94,12%	94,12%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	87,44%	95,04%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4,5%	4,38%	97,33%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Kasasi	55%	52,74%	95,89%
		- PK	100%	97,89%	97,89%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%	97,79%	99,79%

**a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Tahun 2019, sisa perkara pidana, pidana anak, perdata dan Tipikor tahun lalu sebanyak 160 perkara, perkara yang masuk sebanyak 1034 perkara, perkara yang putus sebanyak 1044 perkara, sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan sebanyak 160 perkara, sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 170 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan Tahun 2019 diperoleh dari jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Tahun 2019 yaitu 170 perkara dibagi dengan sisa perkara yang sudah diselesaikan Tahun 2018 yaitu 160 perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara yang dapat diselesaikan selama Tahun 2019 adalah 94,12%.

**JUMLAH SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN**

-----  
X 100%

**JUMLAH SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN**

**Tabel 10. Presentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019**

No.	Perkara	Tahun 2018	Tahun 2019				
		Sisa Perkara	Masuk	Putus	Sisa Perkara Tahun 2018 yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan
1	Pidana Umum	27	324	315	27	36	75.00%
2	Pidana Anak	1	23	24	1	0	0,00%
3	Perdata	132	655	675	132	132	100%
4	Tipikor	0	32	30	0	2	0,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>1034</b>	<b>1044</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>94,12 %</b>



**Tabel 11. Presentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2018**

No.	Perkara	Tahun 2017	Tahun 2018				
		Sisa Perkara	Masuk	Putus	Sisa Perkara Tahun 2017 yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan
1	Pidana Umum	37	326	336	37	27	137,04%
2	Pidana Anak	1	42	42	1	1	100,00%
3	Perdata	116	625	608	116	133	87,22%
4	Tipikor	6	24	30	6	0	0,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>1017</b>	<b>1016</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>99,38 %</b>

Dari perbandingan data presentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 5.26% dibandingkan pada tahun 2018 dikarenakan jumlah perkara yang masuk di tahun 2019 lebih sedikit dibanding tahun 2018.

**b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Tahun 2019, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan yaitu 1044 perkara dibagi dengan dengan jumlah perkara yang ada yaitu 1194 perkara dikalikan 100% sehingga Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 87,44%.

**JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN**

-----  
X 100%

**JUMLAH PERKARA YANG ADA**

**Tabel 12. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019**

No.	Perkara	Tahun 2018	Tahun 2019			
		Sisa Perkara	Masuk	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu
1	Pidana Umum	27	324	315	351	89,74%
2	Pidana Anak	1	23	24	24	100,00%
3	Perdata	132	655	675	787	85,77%
4	Tipikor	0	32	30	32	93,75%
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>1034</b>	<b>1044</b>	<b>1194</b>	<b>87,44%</b>

**Tabel 13. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018**

No.	Perkara	Tahun 2017	Tahun 2018			
		Sisa Perkara	Masuk	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu
1	Pidana Umum	37	326	336	363	92,56%
2	Pidana Anak	1	42	42	43	97,67%
3	Perdata	116	625	608	741	82,05%
4	Tipikor	6	24	30	30	100,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>1017</b>	<b>1016</b>	<b>1177</b>	<b>86,32%</b>



Dari perbandingan data presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 1.12% dibandingkan pada tahun 2018.

**c. Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Tahun 2019, jumlah sisa perkara pada tahun 2018 adalah sebesar 160 Perkara yaitu sisa perkara tahun sebelumnya (tn.1) dikurangi sisa perkara tahun berjalan (tn) tahun 2019

**Tn.1-Tn**

**----- X 100%**

**Tn.1**

yaitu 154 perkara dibagi sisa perkara tahun sebelumnya (tn.1) yaitu 160 dikalikan 100% sehingga Persentase penurunan sisa perkara tahun 2019 adalah sebesar 4,38%.

**Tabel 14. Presentase Penurunan sisa perkara Tahun 2019**

No.	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Tahun 2019	Presentase Penurunan Sisa Perkara
1	Pidana Umum	27	39	-44,44%
2	Pidana Anak	1	0	100%
3	Perdata	132	112	15,15%
4	Tipikor	0	2	0,00%
	<b>Jumlah</b>	160	154	4,38%

**Tabel 15. Presentase Penurunan sisa perkara Tahun 2018**

No.	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2018	Presentase Penurunan Sisa Perkara
1	Pidana Umum	37	27	27,03%
2	Pidana Anak	1	1	0,00%
3	Perdata	116	132	-13,79%
4	Tipikor	6	0	100,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0%</b>

Dari perbandingan data presentase penurunan sisa perkara tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 4,38% dibandingkan pada tahun 2018 dikarenakan jumlah sisa perkara pada tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan tahun 2018

**d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, PK**

**JUMLAH PERKARA YANG TIDAK  
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

$$\frac{\text{-----}}{\text{JUMLAH PUTUSAN PERKARA}} \times 100\%$$

- Tahun 2019, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019 adalah sebanyak 530, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1005 perkara sehingga diperoleh prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibagi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1005 perkara dikalikan 100% sehingga prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 52,74%.
- Tahun 2019, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2019 adalah sebanyak 465, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 475 perkara sehingga diperoleh prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dibagi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak perkara dikalikan 100% sehingga prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 97,89%.

**Tabel 16. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan  
Upaya Hukum Kasasi, PK Tahun 2019**

N o	Nama Pengadilan	Sisa Awal	Mas uk	Putu s	Sisa Akhi r	Ban din g	Ka sa si	P K	Jumla h Perka ra Yang Tidak Meng ajuka n Upaya Huku m Bandi ng	Jumla h Perka ra Yang Tidak Meng ajuka n Upaya Huku m Kasasi	Jumla h Perka ra Yang Tidak Meng ajuka n Upaya Huku m PK	Prese ntase Perka ra Yang Tidak Meng ajuka n Upaya Huku m Kasasi	Prese ntase Perka ra Yang Tidak Meng ajuka n Upaya Huku m PK
1	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	298	146. 847	146. 884	261	102	31	2	146.7 82	71	29	69,61 %	93,55 %
2	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	1.07 7	109. 981	109. 795	1.26 3	158	20 2	2	109.6 37	-44	200	27,85 %	99,01 %
3	PENGADILAN NEGERI BANJAR	22	13.3 36	13.3 45	13	1	1	0	13.34 4	0	1	0,00%	0,00%
4	PENGADILAN NEGERI BEKASI	1.46 6	48.1 48	48.1 35	1.47 9	160	39	1	47.97 5	121	38	75,63 %	97,44 %
5	PENGADILAN NEGERI BOGOR	180	120. 906	120. 909	177	71	17	2	120.8 38	54	15	76,06 %	88,24 %
6	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	38	19.4 08	19.4 12	34	7	1	0	19.40 5	6	1	85,71 %	100,0 0%
7	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	1.26 8	50.1 89	50.1 48	1.30 9	18	8	1	50.13 0	10	7	55,56 %	87,50 %
8	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	92	10.9 34	10.9 62	64	25	11	0	10.93 7	14	11	56,00 %	100,0 0%
9	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	350	42.7 83	42.7 84	349	94	28	1	42.69 0	66	27	70,21 %	96,43 %
10	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	188	78.4 13	78.2 82	319	42	11	0	78.24 0	31	11	73,81 %	0,00%
11	PENGADILAN NEGERI CIREBON	617	23.8 07	23.8 13	611	26	7	0	23.78 7	19	7	73,08 %	100,0 0%
12	PENGADILAN NEGERI DEPOK	295	21.4 07	21.4 38	264	94	23	1	21.34 4	71	22	75,53 %	95,65 %
13	PENGADILAN NEGERI GARUT	662	37.7 18	37.7 21	659	32	11	0	37.68 9	21	11	65,63 %	100,0 0%
14	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	2.08 1	60.5 05	60.5 38	2.04 8	26	15	0	60.51 2	11	15	42,31 %	100,0 0%
15	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	1.56 8	53.3 67	53.3 78	1.55 7	34	10	0	53.34 4	24	10	70,59 %	100,0 0%
16	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	98	12.0 43	12.0 37	104	7	1	0	12.03 0	6	1	85,71 %	100,0 0%
17	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	50	24.3 51	24.0 89	312	7	2	0	24.08 2	5	2	71,43 %	100,0 0%
18	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	66	44.3 34	44.3 21	79	18	12	0	44.30 3	6	12	33,33 %	100,0 0%



19	PENGADILAN NEGERI SUBANG	52	33.0 66	33.0 38	80	16	8	0	33.02 2	8	8	50,00 %	100,0 0%
20	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	469	24.7 39	24.7 40	468	15	7	0	24.72 5	8	7	53,33 %	100,0 0%
21	PENGADILAN NEGERI SUMBER	94	49.6 26	49.5 83	137	25	13	0	49.55 8	12	13	48,00 %	100,0 0%
22	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	71	19.1 72	19.1 92	51	5	1	0	19.18 7	4	1	80,00 %	100,0 0%
23	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	159 1	42.7 76	42.7 94	157 3	22	16	0	42.77 2	6	16	27,27 %	100,0 0%
To tal		12.6 93	1.08 7.85 6	1.08 7.33 8	13.2 11	1.0 05	47 5	1 0	1.086. 333	530	465	52,74 %	97,89 %

**Tabel 17. Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan  
Upaya Hukum Kasasi, PK Tahun 2018**

No	Nama Pengadilan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	642	105.624	105.635	631	94	17	2	105.541	77	15	81,91%	88,24%
2	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	1.085	81.192	81.143	1.134	152	201	5	80.991	-49	196	32,24%	97,51%
3	PENGADILAN NEGERI BANJAR	0	1.000	888	112	1	0	0	887	1	0	100,00 %	0,00%
4	PENGADILAN NEGERI BEKASI	1.640	78.891	79.058	1.472	168	39	4	78.890	129	35	76,79%	89,74%
5	PENGADILAN NEGERI BOGOR	205	92.337	92.362	180	70	13	0	92.292	57	13	81,43%	100,00%
6	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	28	50.682	50.672	38	12	4	0	50.660	8	4	66,67%	100,00%
7	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	1.269	47.149	47.183	1.235	21	12	0	47.162	9	12	42,86%	100,00%

8	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	97	25.170	25.175	92	33	15	0	25.142	18	15	54,55%	100,00%
9	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	347	70.613	70.609	351	98	22	2	70.511	76	20	77,55%	90,91%
10	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	0	15.408	15.220	188	1	0	0	15.219	1	0	100,00%	0,00%
11	PENGADILAN NEGERI CIREBON	597	32.182	32.162	617	24	12	0	32.138	12	12	50,00%	100,00%
12	PENGADILAN NEGERI DEPOK	310	1.558	1.572	296	102	15	0	1.470	87	15	85,29%	100,00%
13	PENGADILAN NEGERI GARUT	682	38.232	38.250	664	21	15	0	38.229	6	15	28,57%	100,00%
14	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	2.107	66.839	66.858	2.088	25	12	0	66.833	13	12	52,00%	100,00%
15	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	170	51.393	49.995	1.568	24	22	0	49.971	2	22	8,33%	100,00%
16	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	95	16.014	16.011	98	9	2	0	16.002	7	2	77,78%	100,00%
17	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	38	39.780	39.768	50	8	5	0	39.760	3	5	37,50%	100,00%
18	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	61	46.125	46.120	66	25	14	0	46.095	11	14	44,00%	100,00%
19	PENGADILAN NEGERI SUBANG	98	41.182	41.228	52	21	4	0	41.207	17	4	80,95%	100,00%
20	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	469	12.928	12.928	469	20	12	0	12.908	8	12	40,00%	100,00%
21	PENGADILAN NEGERI SUMBER	120	42.904	42.930	94	16	5	0	42.914	11	5	68,75%	100,00%
22	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	81	25.651	25.660	72	9	6	0	25.651	3	6	33,33%	100,00%



23	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	1.507	58.554	58.470	1.591	34	18	0	58.436	16	18	47,06%	100,00%
Total		11.648	1.041.408	1.039.897	13.158	988	465	13	1.038.909	523	452	52,94%	97,20%

- Pada tahun 2018 prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 52,94%.
- Pada tahun 2018 prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 97,20%
- Pada tahun 2019 prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 52,74%.
- Pada tahun 2019 prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 97,89%

Dari perbandingan data presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ,PK tahun 2018 dan 2019, untuk upaya hukum kasasi pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 0,20% dibandingkan pada tahun 2018 dan untuk upaya hukum PK pada tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 0,69% dibandingkan pada tahun 2018.

**e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi**

**INDEX KEPUASAN PENCARI  
KEADILAN TAHUN 2019 =  
97,79%**

Pada Tahun 2019 Persentase Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi adalah sebesar **97,79%** berdasarkan hasil survey

kepuasan masyarakat pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor:36/DJU/OT.01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

**INDEX KEPUASAN PENCARI  
KEADILAN TAHUN 2018 =  
91,38%**

Pada Tahun 2019 Persentase Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi adalah sebesar **91.38%**

Dari perbandingan data presentase Index Kepuasan Pencari Keadilan tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 6.41% dibandingkan pada tahun 2018.

## 2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Pengukuran Kinerja Peningkatan Efektifitas  
Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

SASARAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO.	URAIAN	INDIKATOR	2019		
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	0,00%

Untuk pengukuran kinerja peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara berdasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut:

a. **Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

<b>JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG</b>
<b>DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU</b>
----- X 100%
<b>JUMLAH PUTUSAN</b>

pada tahun 2019  
Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu yaitu 100% yaitu jumlah salinan putusan yang dikirim ke

pengadilan pengaju yaitu sebanyak 1044 Perkara dibagi jumlah putusan sebanyak 1044 Perkara di kali 100% adalah sebesar 100%.

pada tahun 2018 Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu yaitu 100% yaitu jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju yaitu sebanyak 1016 Perkara dibagi jumlah putusan sebanyak 1016 Perkara di kali 100% adalah sebesar 100%.

**Tabel 19. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim  
Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019**

No.	Perkara	Tahun 2018	Tahun 2019			
		Sisa Perkara	Masuk	Putus	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
1	Pidana Umum	27	324	315	315	100,00%
2	Pidana Anak	1	23	24	24	100,00%
3	Perdata	132	655	675	675	100,00%
4	Tipikor	0	32	30	30	100,00%

	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>1034</b>	<b>1044</b>	<b>1044</b>	<b>100,00%</b>
--	---------------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------

**Tabel 20. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim  
Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2018**

No.	Perkara	Tahun 2017	Tahun 2018			
		Sisa Perkara	Masuk	Putus	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
1	Pidana Umum	37	326	336	336	100.00%
2	Pidana Anak	1	42	42	42	100.00%
3	Perdata	116	625	608	608	100.00%
4	Tipikor	6	24	30	30	100.00%
	<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>1017</b>	<b>1016</b>	<b>1016</b>	<b>100.00%</b>

Dari perbandingan data presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2018 sama dengan pada tahun 2019 yaitu 100%.

**b. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari**

$$\frac{\text{JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YANG DI UPLOAD DALAM WEBSITE}}{\text{JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DIPUTUS}} \times 100$$

pada tahun 2019  
Presentase Putusan  
Perkara Tipikor yang  
Menarik perhatian  
Masyarakat yang dapat  
diakses secara online

dalam waktu 1 hari yaitu 100% yaitu Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di upload



dalam website Menarik Perhatian Masyarakat sebanyak 32 perkara dibagi Jumlah Perkara Tipikor Menarik Perhatian Masyarakat Yang Di Putus sebanyak 32 perkara di kali 100% adalah sebesar 100%.

pada tahun 2018 Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari yaitu 100% yaitu Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di upload dalam website Menarik Perhatian Masyarakat sebanyak 24 perkara dibagi Jumlah Perkara Tipikor Menarik Perhatian Masyarakat Yang Di Putus sebanyak 24 perkara di kali 100% adalah sebesar 100%.

**Tabel 21. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari Tahun 2019**

Tahun	Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di upload dalam website	Jumlah Isi Putusan Perkara Tipikor yang di upload dalam website Menarik Perhatian Masyarakat	Jumlah Perkara Tipikor Menarik Perhatian Masyarakat Yang Di Putus	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses dalam waktu 1 Hari setelah diputus
2018	24	24	24	100%
2019	32	32	32	100%

Dari perbandingan data Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 sama dibandingkan pada tahun 2018.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Tinggi Bandung menerima 2 (dua) sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).

**Tabel 22. Alokasi DIPA Tahun 2019**

No.	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jumlah DIPA
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA- 005.01.2.097500/2019	5 Desember 2018	30.663.444.000
2.	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA- 005.03.2.099067/2019	5 Desember 2018	412.800.000

#### **1.1 DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung**

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung (Revisi ke-10) adalah sebesar **Rp.37.184.858.000,-** (*Tiga puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 23. DIPA BUA 2019**

1.	Belanja Pegawai	:	Rp.	33.850.711.000,-	(91.03 %)
2.	Belanja Barang	:	Rp.	3.154.647.000,-	(8.49 %)
3.	Belanja Modal	:	Rp.	179.500.000,-	(0.48 %)

**GRAFIK 1**  
**PAGU DIPA BUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**BERDASARKAN JENIS BELANJA**



**Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung**

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung setelah revisi 10 Pagu Minus adalah sebesar **Rp36.965.299.262,-** (*Tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*) atau **99,41%**, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 24. Realisasi anggaran dipa 2019**

1.	BelanjaPegawai	:	Rp.	33.850.709.275,-	(91.57 %)
2.	BelanjaBarang	:	Rp.	2.941.718.987,-	(7.96 %)
3.	Belanja Modal	:	Rp.	172.871.000,-	(0.47 %)

**GRAFIK 2**  
**REALISASI ANGGARAN DIPA BUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**BERDASARKAN JENIS BELANJA**



**2. DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM)**

**2.1 DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung**

DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar **Rp. 412.800.000,-** (*Empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*). DIPA Badilum 03 hasil revisi terakhir (revisi 4) tidak berubah nilainya hanya terdapat pergeseran anggaran saja.

**2.2 Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung**

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar **Rp 406.507.730,-** (*Empat ratus enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*) atau **98.48%**.

#### **A. Keberhasilan**

Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara pidana perdata dan tipikor maupun perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur) dari Pengadilan Negeri se-wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai Pengadilan tingkat banding, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum. Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain:

1. Pelayanan informasi peradilan dengan menyediakan Meja Informasi dan penerapan sistem penelurusan perkara (SIPP).
2. Penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan Meja Pengaduan.

#### **B. Hambatan / Masalah**

1. Keterbatasan anggaran baik menyangkut anggaran program layanan perkantoran maupun anggaran program perlengkapan sarana dan prasarana peradilan
2. Terdapat beberapa pengadilan negeri yang memiliki wilayah hukum beberapa kabupaten/kota dan kelasnya tidak sebanding dengan beban perkara yang harus ditangani.
3. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh bagian/unit kerja pada Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga kegiatan atau rencana tidak dapat direalisasikan/dilaksanakan.
4. Perlu dibentuknya Pengadilan Tingkat Pertama pada daerah Kabupaten, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan keberhasilan dan hambatan tersebut, maka untuk mengatasi kendala kendala dalam pelaksanaan tersebut tugas – tugas dan fungsi diperlukan langkah-langkah diantaranya:

1. Mengupayakan penambahan alokasi anggaran baik anggaran layanan perkantoran maupun anggaran peningkatan sarana dan prasarana (belanja modal) agar tidak menghambat proses penanganan perkara.
2. Mengusulkan kenaikan kelas beberapa pengadilan dan mendatang dibutuhkan pengadilan baru untuk kab Bandung barat, kab tasikmalaya, dan kab. Pangandaran.
3. Mendorong komitmen bersama untuk menghasilkan LKjIP sebagai instrument pelengkap dalam melakukan evaluasi kinerja.
4. Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bandung ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.
5. Serta bagi organisasi Pengadilan Tinggi Bandung, LKjIP Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.



1. SK. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung Sesuai Perma No.7 Tahun 2015
3. Matriks Reviu Renstra Tahun 2015-2019
4. Matriks Pengukuran Kinerja per Triwulan Tahun 2019
5. Penghargaan-Penghargaan
6. Pernyataan Telah Direviu
7. Checklist Reviu



# PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)

Email: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: W11.U/223/OT.01.2/12/2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

### KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
  - Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bandung perlu membentuk Tim Penyusunan laporan tersebut;
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

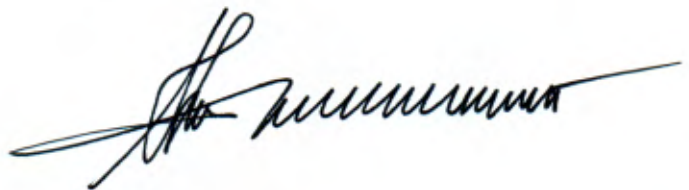
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG**
- Pertama** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bandung;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- Ketiga** : Setiap perkembangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**



**H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR:  
W11.U/223/OT.01.2/12/2019 TANGGAL 26 Desember 2019 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2019 DAN DOKUMEN PERJANJIAN  
KINERJA TAHUN 2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PEMBINA : 1. KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
2. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PENGARAH : HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG

PENANGGUNG JAWAB : 1. PANITERA  
2. SEKRETARIS

KOORDINATOR TIM BIDANG KEPANITERAAN : PANITERA MUDA HUKUM

ANGGOTA TIM BIDANG KEPANITERAAN :

1. PANITERA MUDA PERDATA
2. PANITERA MUDA PIDANA
3. PANITERA MUDA TIPIKOR

KOORDINATOR TIM BIDANG KESEKRETARIATAN : 1. KABAG UMUM DAN KEUANGAN  
2. KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

ANGGOTA TIM BIDANG KESEKRETARIATAN :

1. KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN UMUM
3. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
4. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

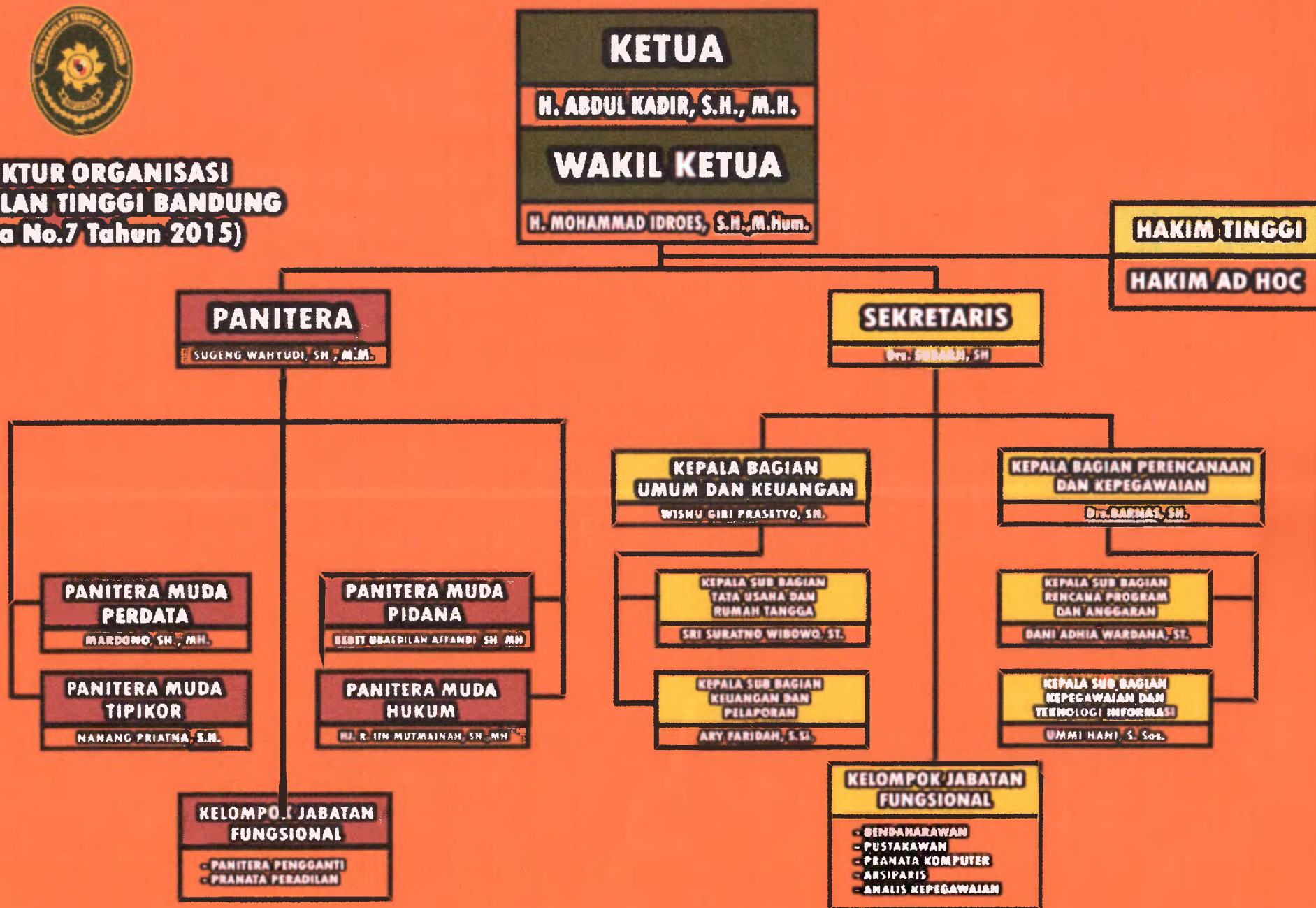


H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.





**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
(Perma No.7 Tahun 2015)**





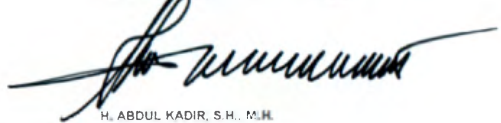
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

# MATRIKS REVU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

Visi:  
Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung  
Misi:  
1. Menjaga kemandirian badan peradilan  
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan  
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan  
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis									
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Matriks Pendanaan (Rupiah)					
															2015	2016	2017	2018	2019	
1	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	85%	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	100%	25.127.534.000	32.045.674.000	34.660.068.000	32.404.081.000	30.513.444.000	
					b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84%	86%	88%	90%	92%										
					c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%	5%	5%	10%	15%										
					d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	60%	60%	65%	70%	75%										
					e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%	82%	84%	88%	90%										
2	SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	4.917.500.000	110.000.000	273.750.000	589.865.000	412.800.000	
					b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	0%	100%	100%										

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

  
H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Nomor : WI1 U/1223/OT 01 2XII/2019  
 Tanggal : 10 Desember 2019  
 Tentang : PENETAPAN REVU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

## MATRIKS REVU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
 INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

## Visi:

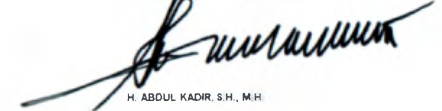
Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung Yang Agung

## Misi:

1. Menegakkan kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis																			
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Metrik Pendanaan (Rupiah)															
															2015	2016	2017	2018	2019											
1	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENJUALAN KEMBALI	85%	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Presentase sika perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi	PRESENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENJUALAN KEMBALI	100%	25 127 534 000	32 045 874 000	34 660 066 000	32 404 061 000	30 513 444 000											
					b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84%	86%	86%	80%	82%																				
					c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	5%	5%	5%	10%	15%																				
					d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	80%	60%	65%	70%	75%																				
					100%	100%	100%	100%	100%																					
					Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%	82%	84%	88%	90%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan di Lingkungan Mahkamah Agung	PRESENTASE INDEKS KEPUKASAN PENCARI Keadilan	100%	517 970 000	436 530 000	520 080 000	1 105 000 000	150 000 000											
2	SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Didirim ke Pengadilan Pengadilan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	PRESENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN	100%	4 917 500 000	110 000 000	273 750 000	589 865 000	412 800 000											
					b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	0%	100%	100%																				

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG



H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2019		
1	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	94,12%	94,12%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	87,44%	95,04%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4,5%	4,38%	97,33%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Kasasi	55%	52,74%	95,89%
		- PK	100%	97,89%	97,89%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	98%	97,79%	99,79%
2	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,00%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	100,00%

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2019		
1	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	94,12%	94,12%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	87,44%	95,04%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4,5%	4,38%	97,33%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Kasasi	55%	52,74%	95,89%
		- PK	100%	97,89%	97,89%
2	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas	98%	97,79%	99,79%
		a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%	100%	100,00%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	100,00%

#### PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2019		
1	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	75,00%	75,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	75,00%	81,52%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4,5%	3,00%	66,67%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Kasasi	55%	40,00%	72,73%
		- PK	100%	75,00%	75,00%
2	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas	98%	75,00%	76,53%
		a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%	75%	75,00%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	75%	75,00%



**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2019		
1	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	50,00%	50,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	40,00%	43,48%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4,5%	2,00%	44,44%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	55% 100%	20,00% 30,00%	36,36% 30,00%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas	98%	50,00%	51,02%
2	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%	50%	50,00%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	50%	50,00%

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I**

Sasaran			Target	Realisasi	Capaian
No.	Uraian	Indikator	2019		
1	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	25,00%	25,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	20,00%	21,74%
		c. Presentase Penurunan Sisa Perkara	4,5%	1,00%	22,22%
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	55% 100%	10,00% 20,00%	18,18% 20,00%
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas	98%	20,00%	20,41%
2	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%	25%	25,00%
		b. Presentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	25%	25,00%

**PENGHARGAAN-PENGHARGAAN ATAS KINERJA INSTANSI  
PADA TAHUN 2019 YANG DIRAIH OLEH PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
SEBAGAI BERIKUT:**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Nama Satker</b>	<b>Instansi Pemberi Penghargaan</b>	<b>Tanggal penyerahkan penghargaan</b>
1	Unit Kerja yang melaksanakan Zona Integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Pengadilan Negeri Bogor, Bekasi, Indramayu, Bandung	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	10 Desember 2019
2	Tanginas Award	Pengadilan Tinggi Bandung		1 Maret 2019
3	Tanginas Award	Pengadilan Tinggi Bandung		24 Juni 2019
4	Penghargaan Dari Ditjen Badilum	Pengadilan Tinggi Bandung	Ditjen Badilum	31 Juli 2019



## **PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Jl. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id)

Email: [info@pt-bandung.go.id](mailto:info@pt-bandung.go.id)

### **PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

### **PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

### **TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bandung untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Bandung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**BANDUNG, 2 JANUARI 2020**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

**H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.**

**NIP. 19540718 198103 1 008**

## CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah Menyajikan Akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7 LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		5 IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10 IKU dan IK telah SMART	✓



